



ENTITAS ACEH DI ASIA TENGGARA: HISTORI DAN REFLEKSI

Inayatillah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

Email Kontributor: inayatillah@staindirundeng.ac.id

Abstract

Makalah ini mengkaji tentang bagaimana entitas Aceh di Asia Tenggara ditinjau dari perspektif sejarah dan apa refleksi yang bisa diperoleh dari peristiwa dan fakta sejarah untuk masa depan Aceh. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis fakta sejarah tentang peran dan kontribusi kerajaan Islam Aceh di Asia Tenggara dan menyimpulkan refleksi berdasarkan peristiwa dan data sejarah untuk kemajuan Aceh di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan melalui empat tahapan, yaitu, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa entitas politik Aceh pada masa berkuasanya kerajaan Islam telah turut andil dalam perancangan politik di tingkat Asia Tenggara dan internasional. Hal ini terlihat dari kemampuan kerajaan Islam Aceh membangun hubungan diplomatik dan perdagangan dengan berbagai bangsa asing, diantaranya Turki, Belanda, Inggris, Perancis, kerajaan di anak benua India dan bangsa asing lainnya karena Aceh dikenal sebagai penghasil rempah khususnya lada. Seiring dengan kemajuan Kerajaan Aceh dan didukung dengan stabilitas politik dan ekonomi telah menjadikan Aceh sebagai pusat keilmuan di Asia Tenggara. Pada masa itu Aceh banyak dikunjungi ulama-ulama dari luar, bahkan memiliki ulama yang dikenal di tingkat internasional. Diantaranya, Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniry, dan Abdurrauf as-Singkili. Refleksi yang dapat ditarik dari fakta sejarah diatas menunjukkan bahwa entitas Aceh telah melakukan peran strategis di kancah internasional dari aspek politik, kemiliteran/pertahanan, ekonomi, dan pendidikan.

Keywords: Entitas Aceh; Asia Tenggara; Histori; Refleksi.

A. PENDAHULUAN

Dalam narasi sejarah Islam Kawasan Asia Tenggara, entitas politik Aceh dapat dipelajari sejak pendirian beberapa kerajaan di pesisir pantai ujung utara Pulau Sumatera, mulai dari Peureulak (Muchsin, 2019), Lamuri (Ajis, 2017), Samudera Pasai (Fitriani, Siregar, & Ramli, 2022) hingga ke Kerajaan Aceh Darussalam (Said, 1981). Aceh telah menjadi pusat perdagangan sejak abad ke-7, bahkan pada abad ke-13-17 Aceh telah menjadi pusat perdagangan penting di Asia Tenggara khususnya perdagangan rempah-rempah. Pada masa itu Aceh telah menjadi pusat kota kosmopolitan dengan memiliki hubungan politik internasional dengan bangsa Eropa (Portugis, Belanda, Inggris, dan Perancis) bangsa di Asia Timur (Cina), bangsa di Jazirah

Arab (Arab Saudi, Mesir, Yaman), bangsa Persia, dan bangsa di Asia Tenggara. Pada masa ini Aceh telah menjadi pusat peradaban Islam di Asia Tenggara. Sumber-sumber entitas politik Aceh dapat ditelaah dalam beberapa hikayat, manuskrip, tulisan para penjelajah dunia, dokumen para penjajah, arsip-arsip yang tersimpan di perpustakaan nasional serta beberapa kajian yang dilakukan para sarjana lokal dan manca negara tentang eksistensi Aceh di Asia Tenggara (Kamaruzzaman, 2016).

Uka Tjandrasasmita (2000) menyakini bahwa pesisir daerah Aceh telah mengalami kepadatan penduduk pada abad ke -17. Pada masa itu pembangunan di ranah politik, pertahanan-kemiliteran, dan ekonomi-perdagangan semakin meningkat, seiring dengan semakin besarnya peran dan kedudukan Banda Aceh sebagai pusat administrasi pemerintahan. Dalam catatan Thomas Bowrey terdapat sekitar 7000 sampai 8000 rumah di pusat kota kerajaan. Tak heran kota ini mendapat reputasi sebagai kota kosmopolit karena keanekaragaman budaya. Meskipun masyarakat pribumi Aceh memiliki bahasa tersendiri Bahasa Aceh tapi mengingat penduduk yang mendiami kota tersebut terdiri dari berbagai bangsa maka bahasa resmi kerajaan Aceh adalah Bahasa Melayu (Andaya, 2001).

Namun realitas sekarang menunjukkan bahwa entitas Aceh di Asia Tenggara mulai meredup bahkan tidak terlihat sejak Aceh bergabung menjadi kesatuan wilayah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh bangsa Aceh untuk meningkatkan eksistensinya di Asia Tenggara namun sampai saat ini masih belum terlihat signifikan. Oleh karena itu makalah ini ditulis untuk mengkaji entitas Aceh di Asia Tenggara dalam konteks histori dan apa rekrifikasi yang bisa diambil dari peristiwa dan fakta sejarah terkait kemajuan entitas Aceh baik dari aspek politik, pertahanan, ekonomi, dan pendidikan pada tempo dulu.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian sejarah dengan menggunakan metode historiografi (Gottschalk, 1986). Penelitian sejarah adalah suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis peristiwa dan rekaman masa lalu. Penelitian ini mempunyai prosedur yang sistematis untuk merekonstruksi peristiwa penting yang terjadi pada masa lalu. Ada empat langkah atau tahapan yang perlu dijalankan dalam pelaksanaan penelitian sejarah (Kuntowijoyo, 2003), adalah:

1. Heuristik, adalah tahapan mencari sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun sumber data penelitian sejarah adalah artikel jurnal, buku, literatur lainnya, catatan harian, maupun laporan penelitian yang memiliki hubungan dengan topik yang diteliti;
2. Kritik sumber, dilaksanakan dengan melakukan studi kritis terhadap data yang telah dikumpulkan. Kritik sumber dilakukan dalam dua cara, yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern dilakukan terhadap isi materi untuk menilai akurasi dan relevansi data, sedangkan kritik ekstern digunakan untuk mengetahui keotentikan sumber yang digunakan;

3. Interpretasi, adalah penafsiran terhadap fakta-fakta yang ada dengan menelaah keterkaitan sumber dengan kajian ini secara teliti dan cermat. Interpretasi dilakukan dengan menafsirkan data yang ditemukan dan direkonstruksi kembali menjadi sebuah cerita sejarah yang mudah dipahami;
4. Historiografi, adalah tahap akhir dalam penelitian sejarah yaitu menyimpulkan dari hasil temuan dan mencatat fakta-fakta yang telah diinterpretasi dari sumber-sumber kemudian dinarasikan dalam bentuk tulisan.

C. FINDINGS AND DISCUSSION

Kamaruzzaman (2016) membagi sejarah entitas politik Aceh di Asia Tenggara menjadi sepuluh fase. Dimana *fase pertama*, Dimulai dari proses islamisasi pada abad ke-7 di ujung utara pulau Sumatera sampai dengan pendirian kerajaan-kerajaan Islam di sepanjang pesisir wilayah Aceh. *Fase kedua*, ditandai dengan pendirian dan kejayaan kerajaan Islam di Aceh sejak 1203 M. Pada fase ini para ulama di Aceh menghasilkan karya-karya monumental sebagai bentuk dukungan kemajuan kesultanan. Pada masa ini rakyat Aceh telah mampu mencapai momentum kekuatan politik di Nusantara dan tingkat internasional. Dalam fase ini entitas politik Aceh benar-benar berada dalam kedaulatan yang bebas dari kendali kekuatan manapun.

Sementara *fase ketiga* dan *keempat* adalah fase kolonialisasi penjajah Belanda yang ingin menguasai Aceh sampai kedatangan Jepang pada Maret 1942. Untuk *fase kelima* dan *keenam* merupakan revolusi sosial yang terjadi dalam internal masyarakat Aceh. *Fase ketujuh*, adalah fase separatisasi I saat terjadi peristiwa DI/TII pada 21 September 1953. *Fase kedelapan* adalah fase integrasi I ketika Aceh dipertahankan menjadi bagian dari kesatuan pemerintah Republik Indonesia. *Fase kesembilan* adalah fase separatisasi II ketika Dr. Tgk. Hasan Di Tiro mendeklarasikan Aceh terpisah dari Republik Indonesia dengan mendirikan kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 1976. *Fase kesepuluh* adalah fase integrasi II ketika GAM menerima tawaran damai dari pemerintah Republik Indonesia pada 15 Agustus 2005.

Berangkat dari sepuluh fase yang dijalani entitas politik Aceh, fase pertama dan kedua merupakan fase yang menunjukkan peran strategis entitas Aceh dalam penyebaran Islam di Nusantara, bahkan entitas bangsa Aceh mampu membawa kemajuan dalam aspek politik, pertahanan, ekonomi, dan pendidikan.

1. Samudera Pasai: Kerajaan Islam berdaulat pertama di Aceh

Pada seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang dilangsungkan di Medan pada 17-20 Maret 1963 (Nasution, 2020) telah disepakati sebagai berikut:

- a. Islam masuk pertama kali ke Indonesia langsung dari Arab pada abad ke-1 Hijriah;
- b. Pesisir sumatera adalah kawasan pertama yang didatangi Islam hingga terbentuknya masyarakat Islam dibawah pemerintahan kerajaan Islam di Aceh.

Meskipun sebagian sejarawan mengatakan bahwa kerajaan Islam pertama berdiri di Aceh adalah Kerajaan Islam Perlak tapi kerajaan yang dikenal oleh para pedagang dan pelawat yang pernah melintasi pesisir pulau Sumatera adalah Kerajaan Samudera Pasai. Kerajaan Samudera Pasai didirikan oleh Meurah Silu yang bergelar

Sultan Malikus Shaleh. Kejayaan Kerajaan Samudera Pasai terjadi pada masa pemerintahan Sultan Malikus Shaleh sampai kedatangan Ibnu Batutah (Said, 1981). Pada masa itu Kerajaan Samudera Pasai telah bangkit dengan cepat baik dalam perdagangan maupun pengkajian ilmu agama Islam.

Menurut catatan Marco Polo (Benedetto, 2014), Kerajaan Samudera Pasai merupakan kerajaan besar dan kaya serta telah melakukan perdagangan internasional dengan negara lain yaitu kapur barus, cengkih, pala, gading gajah, kulit penyu, timah, dan lain-lain. Kejayaan ini berlanjut sampai masa pemerintahan setelahnya yang dijabat oleh anaknya sendiri Sultan Malikut Thahir. Pada zaman pemerintahan Sultan Malikut Thahir, kerajaan Samudera Pasai telah memiliki mata uang sendiri, termasuk uang emas.

Dalam catatan perjalanan Ibnu Batutah (2012), beliau pernah dua kali mengunjungi Kerajaan Samudera Pasai. Kerajaan ini digambarkan sebagai kerajaan yang memiliki kekayaan hasil bumi, diantaranya timah dan emas. Beliau beserta rombongan dijemput dengan kendaraan kuda. Pada masa itu, Sultan yang memerintah adalah seorang pemimpin yang gagah dan cakap, bermazhab Syafi'i, pemeluk agama Islam yang setia yang bernama Al-Malik al-Thahir Jamal al-Din. Beliau seorang yang menjunjung tinggi agama dan menindak keras kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya untuk membayar upeti kepadanya selama mereka belum memeluk agama Islam. Kerajaan ini juga melakukan hubungan dagang yang baik sampai ke Tiongkok maupun ke India. Selama menetap di Pasai, Ibnu Batutah telah banyak menemui orang-orang terkemuka yang pernah dijumpai ketika mengunjungi New Delhi.

Selain itu Cheng Ho, seorang laksamana yang menganut agama Islam, utusan dari Tiongkok pernah mengunjungi kerajaan Samudera Pasai sampai tiga kali. Cheng Ho melakukan perjalanan bersama Ma Huan, seorang muslim dan pakar Bahasa asing. Kesan selama perjalanannya bersama Cheng Ho ditulis dalam buku catatan yang berjudul "Ying Yai Sheng-Lan". Ma Huan menceritakan tentang kondisi alam wilayah Kerajaan Samudera Pasai termasuk tanaman dan buah-buahan yang dihasilkan daerah ini. Dia juga menceritakan tradisi adat istiadat yang berlaku di Pasai sama dengan di Malaka dan Bahasa yang digunakan pun sama. Pelabuhan Pasai banyak disinggahi oleh kapal-kapal Melayu antar pulau dan menjadi pusat perdagangan yang ramai dikunjungi. Ketika itu sekitar tahun 1405 sudah dipergunakan uang emas yang disebut dinar dan timah. Dalam pasar sehari-hari, mereka umumnya mempergunakan uang timah (Said, 1981).

Sejak abad ke-14 Pasai sudah menjalin hubungan dengan bandar dagang Cambay, India. yang merupakan tempat kegiatan pengembangan agama Islam. Batu nisan kuburan Sultan Malikus Shaleh dan raja-raja berikutnya berasal dari Cambay dan dipesan langsung dari sana merupakan bukti kuat hubungan antara Pasai dengan Cambay. Kerjasama hubungan dagang antara Cambay (India Gujarat) dengan Pasai membuat Kerajaan Samudera Pasai dikenal sampai ke Eropa, Timur Tengah, dan Tiongkok (Baiti & Razzaq, 2014).

Selanjutnya pada masa pemerintahan Sultan Ahmad, Kerajaan Samudera Pasai diserang Raja Majapahit antara tahun 1331 dan 1364. Meskipun Sultan Ahmad melakukan perlawanan kuat tapi gagal sehingga beliau melarikan diri dan kerajaannya diduduki pasukan Majapahit (Said, 1981; Maulia & Ichsan, 2022). Penyerangan yang dilakukan Kerajaan Majapahit bertujuan untuk menyatukan kepulauan Nusantara. Penyerangan ini memiliki fungsi strategis untuk menguasai lalu lintas perdagangan



internasional karena penyatuan nusantara yang dapat terwujud jika mampu menguasai lalu lintas perdagangan arah ke timur (Tiongkok dan sebagainya) melalui pulau Kalimantan dan arah Barat (Malaya, India, Arab, dan Eropah) melalui pesisir pulau Sumatera.

2. Kerajaan Aceh Darussalam

Berdasarkan catatan sejarah, belum ditemukan secara jelas asal-usul Kerajaan Aceh Darussalam tapi informasi yang didapat Kerajaan ini berdiri setelah Kerajaan Lamuri, kerajaan Islam yang berdiri semasa dengan Samudera Pasai, melemah hingga runtuh akibat serangan pasukan Raja Majapahit. Meskipun setelah keruntuhan Kerajaan Lamuri, telah berdiri beberapa kerajaan yaitu, Darul Kamal, Meukuta Alam, dan Aceh Darussalam, tapi Kerajaan Aceh Darussalam yang memiliki peran strategis di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan Hikayat Aceh diceritakan bahwa pendiri Kerajaan Aceh Darussalam adalah Sultan Musaffar Syah yang ketika itu menjadi Raja Meukuta Alam bersaudara dengan Raja Inayat Syah menjadi Raja Darul Kamal. Namun mereka selalu berperang hingga pada akhirnya dimenangkan oleh Sultan Musaffar Syah. Kemudian Sultan Musaffar Syah menyatukan negeri itu menjadi satu kerajaan yang diberi nama Kerajaan Aceh Darussalam dan memerintah selama lebih kurang 30 tahun (1465-1497) yang kemudian digantikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah (Said, 1981). Namun menurut Hoesein Djajadiningrat (1982) berdasarkan catatan para pendatang dari Portugis dan kronik Melayu yang telah teruji sumbernya, sebelum tahun 1500 Aceh merupakan wilayah yang kurang bernilai sampai datang penguasa pertama Ali Mughayat Syah.

Pada abad 16, Portugis mulai memainkan perannya untuk menguasai kota pelabuhan strategis di sekitar selat Malaka. D'Albuquerque memimpin armada kapal perang yang berjumlah 19 kapal yang terisi penuh dengan tentara dan alat-alat perang modern saat itu untuk menyerang Malaka pada tahun 1511 (Ricklefs, 2008). Setelah berhasil menguasai Malaka, Portugis mulai mencoba mempengaruhi Kerajaan Samudera Pasai dengan *politik divide et impera*. Portugis mampu mempengaruhi raja Pasai yang memerintah kala itu sehingga mendapatkan izin untuk melakukan praktek monopoli membeli hasil bumi di Pasai. Portugis juga membangun kekuatan bersenjata dan benteng di Pasai. Kemudian Portugis menyasar kerajaan Pedir dan berhasil melemahkan kekuatan Raja sehingga memperoleh izin untuk mendirikan faktori disertai pengamanan oleh sejumlah serdadu (Said, 1981).

Serangan Portugis berikutnya ke perairan Aceh dilakukan pada Mei 1521 yang dipimpin Jorge de Brito. Dalam pertempuran hebat itu Portugis dikalahkan oleh Angkatan perang Ali Mughayat Syah dengan tewasnya de Brito (Haykal, 2022). Angkatan perang Ali Mughayat Syah mengejar sisa armada Portugis yang lari sampai ke Pedir. Setelah Pedir berhasil dikuasai, Angkatan perang Ali Mughayat Syah mengejar Portugis sampai ke Pasai dan berhasil mematahkan perlawanan mereka. Orang yang berjasa membebaskan Pasai dari cengkeraman Portugis adalah panglima Ibrahim namun beliau syahid dalam peperangan tersebut dan jenazahnya dibawa ke Banda Aceh untuk dimakamkan disana pada 30 November 1535. Kekalahan Portugis terhadap pasukan Aceh telah memperkuat pasukan Aceh dengan perlengkapan perang yang diperoleh dari rampasan alat-alat perang Portugis. Ali Mughayat Syah berhasil merampas dari [Portugis](#), lonceng "Cakra Dunia" hadiah laksamana Cheng Ho pada Raja

Pasai yang diberikan pada abad ke-15. Selanjutnya Ali Mughayat Syah melaksanakan pembangunan di Aceh sampai mangkat pada 7 Agustus 1530 dan beliau memerintah di Kerajaan Aceh Darussalam selama 10 tahun (Said, 1981).

Sultan Aceh berikutnya yang memiliki peran penting dalam pengembangan Kerajaan Aceh Darussalam adalah Al-Kahhar (1537-1571). Prioritas utama yang dilaksanakan Al-Kahhar adalah peningkatan perdagangan dan penumpasan imperialis Portugis. Perdagangan internasional yang telah berkembang pada masa Ali Mughayat Syah ditingkatkan terus oleh Al-Kahhar. Komoditi ekspor aceh pada masa itu adalah lada yang diangkut saudagar gujarat dan asing lainnya sampai ke Laut Merah. Pada masa pemerintahan Al-Kahhar, Seorang petualang Portugis, Pinto, mengatakan bahwa Kerajaan Aceh Darussalam telah mengadakan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Turki Usmani pada abad ke-16 (sekitar tahun 1540) (Djajadiningrat, 1982). Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Aceh mendapat sumbangan alat persenjataan perang dari Turki dan 300 orang ahli pembuat senjata dan strategi perang (Haykal, 2022). Alat persenjataan ini akan digunakan untuk memerangi kerajaan Batak yang meminta bantuan ke Portugis untuk menghadapi serangan Aceh. Setelah mendapat bantuan dari Turki, Kerajaan Aceh melakukan penyerangan ke Raja Batak dengan kekalahan di pihak Batak (Said, 1981).

Sejak tahun 1547 sampai 1568 armada Aceh melakukan serangan bertubi-tubi pada pasukan Portugis. Pada tahun 1568 serangan Aceh terhadap Portugis langsung dipimpin oleh Sultan Al-Kahhar. Pertempuran hebat berlangsung dengan memakan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Dalam serangan ini Portugis dibantu oleh Sultan Johor sehingga Aceh melakukan serangan berikutnya ke Johor sebelum kembali ke Aceh (Wijaya, 2020). Meskipun serangan Kerajaan Aceh ke pasukan Portugis di Malaka dilakukan secara terus menerus tapi Portugis belum mampu mengguguli Aceh karena kekuatan armada Aceh. Tahun 1571 Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Kahhar tutup usia, dimakamkan di Kandang XII pada 28 September 1571. Dalam Bustanus salatin tertulis masa pemerintahan Al-Kahhar selama 28 tahun 9 bulan. Mangkatnya Sultan Al-Kahhar telah membuat Aceh kehilangan Raja yang perkasa, tegas tapi adil, peretas kemashuran nama Aceh di dunia internasional. Sepeninggal Al-Kahhar, Raja penggantinya, Sultan Husin Ali Riayat Syah (1571-1579), melanjutkan misi penggayangan Portugis di Malaka. Pada 1 Januari 1577, armada Aceh dengan kekuatan 1000 prajurit dan Meriam yang banyak langsung dipimpin Sultan Ali Riayat Syah menggempur benteng Portugis di Malaka tapi serangan ini tidak berhasil melakukan pendaratan karena dihadang 12 kapal perang Portugis (Said, 1981).

Sultan berikutnya yang berperan memajukan Kerajaan Aceh adalah Sultan Mansur Syah, putra Raja Perak yang dibawa ke Aceh dan dinikahkan dengan puteri Sultan Aceh bernama Ghana. Bustanussalatin mencatat bahwa Sultan Mansur Syah seorang yang adil, alim, amat saleh, tapi memiliki karakter yang keras. Beliau memberi kesempatan yang luas bagi guru-guru agama dan ulama dari luar negeri untuk datang dan menetap di Aceh. Pada masa ini telah tiba beberapa alim ulama dari Makkah dan Gujarat untuk mengajarkan berbagai ilmu agama Islam, seperti Ilmu Munatiq Ma'anu dan ilmu Biyan Badi'i, Ilmu Usul dan Ilmu Fiqh. Sultan Mansur Syah hanya memerintah beberapa tahun dan mangkat pada 12 Januari 1585 (Djajadiningrat, 1982).

Sultan berikutnya yang telah membawa kemajuan Kerajaan Aceh Darussalam dalam berbagai bidang adalah Sultan Iskandar Muda lebih terkenal dengan nama Marhoem Mahkota Alam. Menurut Bustanussalatin, beliau mengembangkan syiar



agama dan membangun banyak masjid-masjid, diantara yang terkenal adalah Masjid Baiturrahman (Djajadiningrat, 1982). Sultan Iskandar Muda melanjutkan politik ekspansi raja-raja Aceh yang terhenti setelah mangkatnya Sultan Mansur Syah. Sultan Iskandar Muda berhasil menguasai dan menyatukan sepanjang pesisir barat dan timur kepulauan Sumatera, Kedah, Perak, Johor, dan Pahang (Said, 1981; Mailin, 2021). Dalam Bustanussalatin digambarkan Sultan Iskandar Muda mengajak anak buah dan masyarakatnya untuk hidup mengikuti ajaran Islam dan melarang mereka minum minuman keras yang memabukkan dan bermain judi. Beliau memiliki sikap yang sangat lembut dan setiap kali shalat jumat membagi-bagikan hadiah bagi orang-orang miskin dan mengatur pajak-pajak serta sering memerintahkan untuk membangun masjid (Djajadiningrat, 1982).

Setelah Sultan Iskandar Muda mangkat, tampuk kepemimpinan diserahkan pada menantu beliau, Sultan Iskandar Tsani. Meskipun Sultan Iskandar Tsani tidak lama memerintah tapi perkembangan pendidikan dan ilmu agama mengalami kemajuan sampai masa pemerintahan sultanah, khususnya Sultanah Taj 'Alam Safiat al-Din (1641-1675). Setelah Sultan Iskandar Tsani wafat, tampuk kepemimpinan Kerajaan Aceh dipimpin oleh empat orang sultanah secara berturut-turut selama lebih kurang 58 tahun, yaitu, Sultanah Taj 'Alam Safiat al-Din (1641-1675), Sultanah Nur 'Alam Naqiyyat al-Din (1675-1678), Sultanah 'Inayat Shah Zakiyyat al-Din (1678-1688), dan Sultanah Kamalat al-Din (1688-1699). Pada masa pemerintahan empat sultanah, tidak terjadi lagi perluasan wilayah sebagaimana pada masa Sultan Iskandar Muda tapi pada masa Sultanah ini Aceh telah mengalami perkembangan di bidang ekonomi (Suud, 2015), pendidikan dan ilmu pengetahuan. Khususnya pada masa pemerintahan Sultanah Taj 'Alam Safiat al-Din, telah banyak kitab-kitab yang ditulis pada masa itu oleh para ulama yang menetap di Aceh (Said, 1981; Ilham & Merry, 2021). Setelah berakhir pemerintahan para ratu di kerajaan Aceh Darussalam, kondisi kerajaan semakin meredup dan pada waktu berikutnya para ulama dan umara Aceh disibukkan dengan peperangan melawan penjajah Belanda.

3. Pertahanan Militer Kerajaan Aceh

Pada masa Sultan Al-Mukammal berkuasa selama lebih kurang 15 tahun (1589-1604) kondisi pertahanan militer Kerajaan Aceh semakin kuat. Kekuatan militer ini seiring dengan peningkatan perhubungan dagang internasional yang semakin meluas. Davis mengatakan bahwa Aceh memiliki kekuatan 100 kapal perang, setiap kapal bisa ditempatkan 400 prajurit. Salah satu Laksamana Angkatan Laut seorang perempuan yang dikenal dengan nama Malahayati. Persenjataan perang yang digunakan masa itu adalah meriam yang terbuat dari baja, tombak, keris, pedang, panah dan lain-lain. Kekuatan pertahanan darat diperkuat dengan tentara barisan gajah yang dikendarai para hulubalang (Said, 1981).

Pada masa pemerintahan Al-Kahhar (1537-1571), Kerajaan Aceh Darussalam telah mengadakan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Turki Usmani pada abad ke-16 (sekitar tahun 1540) (Haykal, 2022). Aceh mendapat sumbangan dari Kerajaan Turki Usmani dalam bentuk persenjataan perang dan para ahli perang dan persenjataan. Bantuan persenjataan yang diberikan Kerajaan Turki Usmani telah memperkuat armada perang Aceh yang selanjutnya digunakan untuk menyerang pasukan penjajah Portugis dan menaklukkan kerajaan yang bersekutu dengan Portugis.

Sementara itu ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa menerapkan kebijakan untuk memperkuat angkatan bersenjata guna melindungi Aceh dari serangan bangsa asing yang ingin menguasai pusat perdagangan di wilayah Aceh. Persenjataan yang digunakan untuk berperan pada saat itu adalah meriam yang diperoleh dari hasil kerjasama dengan kerajaan Turki Usmani. Sultan Iskandar Muda juga membentuk ekspedisi militer untuk memperbaiki kota Aceh dan menjaga agar tidak ada satupun pihak asing yang turut campur urusan kenegaraan serta menguasai pelabuhan di pesisir pantai selat Malaka untuk melemahkan serangan penjajah (Zuboidi, 2018).

4. Bidang Ekonomi

Aceh merupakan sekumpulan entitas yang memiliki beragam profesi untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Selain berniaga, masyarakat Aceh ada yang berprofesi sebagai nelayan yang hilir mudik ke perairan dengan menggunakan perahu bercadik dua. Guillaume Dampier, pelaut Perancis, yang pernah mengunjungi Aceh abad ke-16 menyebutkan bahwa profesi nelayan adalah orang terkaya ketimbang profesi lainnya (Lombard, 1986).

Pada masa Sultan Al-Mukammal berkuasa selama lebih kurang 15 tahun (1589-1604) kondisi pertahanan militer Kerajaan Aceh semakin kuat seiring dengan peningkatan perhubungan dagang internasional yang semakin meluas. Satu demi satu pedagan yang berasal dari Eropah selain Portugis mulai bermunculan, yaitu Belanda, Inggris dan Perancis. Berdasarkan cerita John Davis, seorang muallim Inggris, pada masa itu sudah banyak toke-toke Tionghoa dan menempati satu tempat tersendiri. Davis juga melihat pedagang dari Portugis, Gujarat, Arab, Benggali, dan India sudah banyak bertempat tinggal di situ (Said, 1981).

Pada masa al-Mukammal, Aceh telah mempunyai beberapa macam mata uang, dari emas, pardu, dan tahlil. Davis hanya melihat uang mas sebesar uang sen yang serupa dengan uang di Inggris. Lainnya dari timah yang disebut kasa, 1600 kasa setara 1 emas, 400 kasa satu kupang, empat kupang setara 1 emas, 5 emas satu silling Inggris, 4 emas setara 1 pardu, dan 4 pardu satu tahlil. Kerajaan Aceh terkenal sebagai penghasil lada dan jual beli lada ditimbang menurut bahar. Satu bahar serupa 360 pond Inggris beratnya, harganya 35 rupiah Belanda dimana satu pond sama dengan 21 ons di Inggris (Said, 1981).

Pada masa Sultan Iskandar Muda berkuasa, Aceh telah menjadi kerajaan yang besar dan mandiri secara ekonomi dengan perdagangan sebagai tumpuan utama. Komoditi utama yang diminati pedagang asing adalah lada, timah, emas, sutra, minyak, kapur barus, kemenyan, pinang, dan gajah. Perekonomian kerajaan Aceh Darussalam mengalami peningkatan yang sangat pesat karena disokong oleh komoditas lada yang perniagaannya dilakukan secara monopoli. Selain monopoli harga lada, Sultan Iskandar Muda menerapkan pembayaran bea cukai dari harga yang ditetapkan kepada daerah yang ditaklukkannya atas kapal-kapal yang berlabuh di Aceh (Djajadiningrat, 1982; Lombard, 1986).

Demi untuk meningkatkan perekonomian, Sultan Iskandar Muda memperluas wilayah perdagangannya melalui kerjasama dengan kerajaan lokal di Nusantara dan juga bangsa asing, seperti Eropa, Inggris, India, dan sebagainya dengan komoditi ekspor utamanya adalah lada. Bukti kerjasama perdagangan di tingkat internasional dapat dilihat pada bantuan yang telah diberikan kerajaan Turki Usmani untuk mendukung Aceh penyerangan Portugis di Malaka, pedang bertahtakan emas dan permata yang



diberikan Raja Perancis untuk Sultan Iskandar Muda dan menyebut beliau dengan kata “*Le Roy Lolei*” yang berarti raja yang utama. Kaisar Tiongkok memberikan lukisan dengan dibubuhi tandatangan “*Saiy Aceh*” yang bermakna singa Aceh (Hamka, 2002).

5. Hubungan Diplomatik Aceh di tingkat internasional

Hubungan diplomatik antara Aceh dengan Turki terekam dalam surat keputusan bertanggal 20 September 1567, Sultan Selim II menyambut positif permintaan bantuan Sultan Aceh yang dibawa oleh utusannya, Husin, untuk menumpas penjajah Portugis yang mulai menguasai pusat perdagangan di Nusantara. Tanggapan positif dari Sultan Selim II terlihat pada surat keputusan itu dengan menginstruksikan penguasa wilayah Yaman, Aden, dan Mekkah membantu tentara Turki yang hendak berangkat menuju Aceh. Turki memberangkatkan 15 buah galley dan dua bark dari Kairo bersama seorang ahli pembuat Meriam dengan 7 orang tukangnyanya. Ekspedisi ini dipimpin oleh Laksamana Turki Kurt Oglu Hizir dengan tugas khusus menumpas musuh Aceh demi mempertahankan agama Islam (Said, 1981).

Di sisi lain, meskipun pada awal hubungan dagang antara Belanda dengan Aceh berkesan tidak baik dengan meninggalnya Cornelis de Houtman namun Belanda berusaha untuk membangun hubungan diplomatik yang baik dengan harapan akan memperlancar perdagangan dengan Aceh. Agar harapan ini terwujud, dikirim satu delegasi yang hendak menyampaikan rayuan Prins Maurits. Surat dari Prins Maurits ditulis dalam Bahasa Spanyol berbentuk “Oorkonde” dihiasi oleh ukiran tangan yang cantik dengan huruf-huruf bunganya yang ditulis menggunakan tinta air emas, ditandatangani oleh Prins Maurits berbubuh capnya pula. Sesudah diterima dengan resmi di Aceh, dibubuh cap pula oleh Sultan (Teh Gallop, 2004). Surat yang dikirim itu bertanggal 11 Desember 1600, berisi rayuan untuk mengadakan hubungan perniagaan dengan Aceh dan mengatakan bahwa penyerangan terhadap Cornelis de Houtman akibat provokasi dari Portugis dan Spanyol yang merupakan musuhnya. Untuk itu Prins Maurits memohon untuk tidak mempercayai orang Portugis dan tidak perlu mencurigai lagi warga yang datang dari Belanda untuk berniaga. Prins Maurits merayu dengan kalimat yang halus dan mengirim bingkisan yang bagus dan mahal. Untuk menguatkan rayuannya, pemerintah Belanda meminta surat introduksi (anjuran) kepada Raja di Afrika Timur yang mempunyai hubungan diplomatik yang baik dengan Kerajaan Aceh (Said, 1981).

Sesampai di Aceh, delegasi Belanda mendapat sambutan hangat dari Al-Mukammal dan beliau menerima surat itu serta membubuhkan capnya setelah membaca isinya. Kemudian Sultan berencana untuk mengirim utusan Aceh ke Belanda untuk mempelajari sejauh mana potensi hubungan diplomatik dengan Belanda. Utusan Aceh yang berangkat bersama kapal Belanda, terdiri dari Abdul Hamid sebagai ketua, Sri Muhammad, Laksamana Aceh, dan Mir Hasan sebagai anggota. Turut berangkat bersama rombongan Loenard Werner asal Luxemburg, seorang juru Bahasa dan pengiring lainnya, saudagar-saudagar Arab. Di tengah perjalanan dicegat kapal Portugis dan kapal Belanda melakukan perlawanan yang pada akhirnya dimenangkan oleh Belanda (Taylor, 2018). Setibanya delegasi di Netherland pada Agustus 1602, ketua delegasi Aceh Abdul Hamid meninggal setelah dua puluh hari tiba di Belanda dan dimakamkan di Middelburg (Djajadiningrat, 1982). Kedatangan delegasi Aceh disambut dengan meriah oleh Prins Maurits dan mereka mengunjungi kota dan kampung-

kampung Belanda serta melihat hasil kemenangan perang melawan Spanyol. Kemudian delegasi Aceh pulang dengan menumpang rombongan Steven van der Hagen sesudah berada lebih kurang 16 bulan (hingga 18 Desember 1603) disana (Said, 1981).

Keberangkatan utusan Aceh ini dapat dicatat sebagai pengakuan pertama kerajaan Aceh berdaulat terhadap kelahiran negara Belanda secara *de jure* dan *de facto* (Nazaruddin, 2014). Dalam perjalanan pulang rombongan Belanda menyinggahi India dan berhasil memperoleh surat perkenalan (introduksi) untuk Sultan Akbar, raja kerajaan Mughal. Surat itu mempermudah Belanda dalam memperoleh fasilitas dagang di bandar-bandar besar di India, seperti Cambay (Gujarat). Sultan Aceh juga memberikan surat introduksi juga diberikan untuk mempermudah Belanda mendapat izin berniaga dengan Raja Kalikut, Raja Benggali dan Sailan. Belanda juga mendapatkan izin untuk membuka kantor dagang di ibukota Aceh Darussalam (Said, 1981).

Kunjungan berikutnya datang dari Inggris, Sir James Lancaster, pada 6 juni 1602 dengan membawa surat dan hadiah dari Ratu Inggris, Ratu Elizabeth (Riddell, 2002). Sultan Al-Mukammal menyambut utusan dari Inggris dengan sambutan yang meriah seperti menyambut tamu agung. Dalam surat itu, Ratu Elizabeth memberi pujian atas kebesaran dan kegagahan Sultan ketika menyerang Portugis tahun 1575 dibawah pimpinan panglima perangnya Ragamakota. Sebaliknya Sultan Aceh membalas surat itu dengan menyatakan kekagumannya pada kebesaran Ratu Inggris yang masa itu telah memerintah kerajaan-kerangan Inggris, Perancis, Irlandia, Hollanda, dan Vriesland. Sultan juga menyatakan kekagumannya karena Ratu Inggris dapat mengalahkan Raja Spanyol yang ketika itu menguasai Portugis. Kemudian Sultan Al-Mukammal juga mengeluarkan surat persetujuan bagi Inggris untuk membeli lada langsung ke Pariaman (Said, 1981).

6. Aceh sebagai Pusat Keilmuan dan Destinasi para Ulama

Kemampuan raja-raja Aceh untuk menciptakan keamanan negeri dengan stabilitas ekonomi yang mapan telah mengundang orang asing untuk datang meramaikan bandar pesisir Aceh. Kedatangan mereka ke Aceh tidak hanya untuk berdagang tetapi juga untuk menyebarkan dakwah dan memperdalam ilmu agama. Banyak berdatangan guru-guru dari luar Aceh bahkan luar Asia Tenggara untuk menetap dan mengajar ilmu agama Islam. Jika ditelusuri secara mendasar, tradisi ini telah ada sejak berdiri kerajaan Samudera Pasai abad ke-13, ilmu-ilmu agama Islam telah berkembang di seluruh nusantara. Kesan Ibn Batutah terhadap Sultan Malik al-Zahir putra sulung Malik al-Shaleh adalah seorang yang cinta agama dan dikelilingi oleh para ulama dan fukaha, diantaranya ada yang datang dari Parsi yang berperan sebagai Penasehat Sultan dan putra-putranya. Sultan bermazhab Syafi'i dan menjalankan amal ibadah dengan sungguh-sungguh (Bathuthah, 2012).

Dalam kurun waktu dua setengah abad sejak berdirinya Kerajaan Samudera Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam, Islam tidak hanya tersebar merata di wilayah Aceh tetapi juga telah banyak menghasilkan murid-murid pribumi yang menjadi kader mubaligh untuk generasi penerus dalam dakwah dan pengembangan Islam. Pada masa itu Aceh tidak hanya dikenal sebagai ibukota kerajaan tetapi juga berfungsi sebagai pusat perdagangan dan intelektual di Nusantara. Diantara ulama Aceh yang berpengaruh di Nusantara dan Asia Tenggara, adalah:



a. Hamzah Fansuri

Menurut catatan sejarah, Hamzah Fansuri dilahirkan di kota Barus, yang masa itu dikenal dengan Fansur diantara Sinkil dan Sibolga. Ada pendapat yang mengatakan, berasal dari suatu desa yang bernama Syahru Nawu di Siam, Thailand. Ada juga yang mengatakan bahwa syahru nawi adalah nama yang dulu digunakan untuk menyebut tanah Aceh. Belum diketahui secara pasti tahun lahir dan wafat Hamzah Fansuri, tapi beliau diperkirakan hidup sebelum tahun 1630-an karena muridnya yang juga komentator Syarh Rubb, Syamsuddin al-Sumatrani wafat tahun 1630 (Ni'am, 2017).

Semasa hidup Hamzah Fansuri telah melakukan perjalanan intelektual ke berbagai daerah, khususnya tempat yang terdapat pusat kajian keilmuan dan pengajaran Islam. Beberapa wilayah yang pernah beliau singgahi adalah Banten, Johor, Siam, India, Persia, Mekkah, Madinah, Yerusalem, dan Baghdad. Di Baghdad Hamzah Fansuri belajar Tarekat Qadiriyyah dan setelah melakukan pengembaraan kembali ke Aceh. Pada mulanya beliau mengajar di Barus kemudian pindah ke Banda Aceh (Riddell, 2001). Masyarakat banyak mempercayai kuburan beliau terletak diantara Sinkel dan Rundeng (Faridy, 2008).

Hamzah Fansuri dalam pengembaraan intelektualnya mengikuti aliran tasawuf Syekh Abd al-Qadir al-Jailani dengan tarekat Qadiriyyah. Dalam bidang fiqih, Hamzah Fansuri mengikuti mazhab Syafi'i. Namun Hamzah Fansuri dianggap sebagai pemikir dan penganut paham wahdat al-wujud, hulul, dan ittihad. Oleh sebab itu, beliau sering dikecam sebagai orang zindiq, sesat, bahkan termasuk dalam golongan orang kafir dan diduga sebagai pengikut ajaran Syiah. Beliau pernah melakukan perjalanan untuk menyebarkan pemahaman dan ajarannya sampai ke Pahang, Kedah, dan Jawa (Ni'am, 2017).

Hamzah Fansuri telah menghasilkan karya yang cukup banyak tapi sebagian dari karya tulisnya menjadi korban pembakaran pada waktu beliau mengalami hukuman bunuh. Beliau dan muridnya Syamsuddin as-Sumatrani di bunuh dan karya-karyanya dibakar di halaman Masjid Raya Baiturrahman tahun 1637 M, ketika tahun pertama Sultan Iskandar Tsani berkuasa (Faridy, 2008).

b. Syamsuddin as-Sumatrani

Nama lengkap Syamsuddin al-Sumatrani adalah Syamsuddin bin Abdillah Sumatrani atau disebut dengan Syamsuddin Pasai. Syamsuddin merupakan murid Hamzah Fansuri dan banyak belajar tentang pendidikan kesufian dari gurunya. Tidak ada informasi yang jelas tentang tempat dan waktu kelahiran Syamsuddin al-Sumatrani. Beliau wafat pada pertempuran Portugis di Malaka tahun 1630 M tapi tidak diketahui pasti letak makam beliau (Dahlan, 1991).

Syamsuddin merupakan penasehat Sultan Iskandar Muda, pemuka agama sekaligus ulama yang mashur di kalangan istana Kerajaan Aceh Darussalam (Djajadiningrat, 1982). Dukungan Sultan Iskandar muda telah mempermudah Syamsuddin as-Sumatrani untuk menyebarkan ajarannya yang dikenal dengan nama "martabat tujuh" yang merupakan lanjutan dari paham Ibn Arabi. Oleh sebab itu Syamsuddin as-Sumatrani dikenal sebagai tokoh aliran wujudiyah yang menganut paham wahdatul wujud (Kurniati, 2021).

c. Nuruddin Ar-Raniry

Nuruddin Ar-Raniry memiliki nama lengkap Nur ad-Din Muhammad Ibn Ali Ibn Hasanji al-Hamid asy-Syafi'i al-Asya'ari al-Aydarusi ar-Raniry. Beliau lahir sekitar abad

ke-16 di kota Ranir, India dan wafat pada 21 September 1658. Beliau merupakan seorang penasehat kesultanan Aceh. Pada awalnya kedatangan beliau ke Aceh tidak mendapat sambutan dari Sultan yang berkuasa masa itu sehingga beliau melanjutkan perjalanannya ke Pahang dan kembali lagi ketika Sultan Iskandar Tsani berkuasa 1637-1644 (Farida, 2017).

Nuruddin Ar-Raniry diangkat sebagai mufti kerajaan pada masa Sultan Iskandar Tsani dan ini menjadi momentum baginya untuk menyebarkan ajaran tasawuf akhlaki. Jabatan yang disandanginya mempermudah beliau untuk melakukan pembersihan terhadap pemahaman tasawuf sebelumnya yang dianggap menyimpang. Ajaran tasawuf akhlaki yang dibawa Ar-Raniry mendapat tempat di kalangan penduduk Aceh yang mayoritas beragama sunni. Pada saat Ar-Raniry menetap di Aceh, sangat banyak karya-karya yang dihasilkan khususnya karya beliau di bidang tasawuf (Kurniati, 2021).

d. Abdurrauf al-Singkili

Abdurrauf al-Singkili memiliki nama lengkap Abdurrauf bin Ali al-Fansuri al-Jawi al-Singkili. Tidak diketahui secara pasti tahun kelahiran beliau, para sejarawan berbeda pendapat dalam menetapkan tahun lahirannya, ada yang mengatakan tahun 1593 dan ada pendapat lain yang menyebutkan tahun 1615 tapi pendapat yang kedua ini yang sering digunakan. Al-Singkili belajar beberapa disiplin ilmu agama langsung dari ayahnya Ali Fansuri, pendiri Dayah Suro di Simpang Kanan, Aceh Singkil. Kemudian menambah dan memperdalam ilmu agama di Dayah Blang Pirang, wilayah Pasai, Aceh Utara sebelum pergi menuju Jazirah Arab untuk menunaikan ibadah haji. Namun beliau tidak langsung pulang setelah menunaikan ibadah haji tetapi menetap di Makkah beberapa lama untuk mendalami ilmu agama (Kurahman & Qudsy, 2021). Sekitar tahun 1661, al-Singkili pulang ke Aceh dan diangkat sebagai qadhi kerajaan pada masa Sultanah Ratu Shafiyat al-Din. Beliau menduduki jabatan ini selama puluhan tahun, sehingga merasakan kepemimpinan empat orang sultanah (Said, 1981).

Al-Singkili memiliki pandangan yang berbeda dengan al-Raniry, khususnya dalam bidang ilmu tasawuf. Meskipun beliau termasuk ulama yang menolak paham wujudiyyah atau wahdat al-wujud tetapi bersikap sangat hati-hati dalam mengambil langkah. Al-Singkili tidak mau ikut-ikutan mengkafirkan pengikut paham wujudiyyah dan bahkan mengingatkan masyarakat tentang bahayanya sikap tersebut. Moderasi pemikiran al-Singkili terlihat pada karyanya yang berjudul "Mir'ah al-Tullab" yang berusaha mencari jalan tengah antara kaum antinomi ekstatis (tasawuf murni) lokal dan kaum Syariah-sentris (fikih) (Kurahman & Qudsy, 2021). Beliau berusaha memadukan antara fikih dan tasawuf dalam praktik agama. Menurut al-Singkili, manusia tidak berwujud dengan dirinya sendiri tapi bayangan. *A'yan kharijah* merupakan bayangan dari *a'yan tsabitah* yang merupakan bayangan dari zat Allah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan refleksi atas data peristiwa dan fakta sejarah mengenai entitas Aceh di Asia Tenggara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kemampuan Aceh dalam membangun entitas politik telah menunjukkan kiprahnya dalam percaturan politik internasional dengan membangun hubungan diplomatik dan perdagangan dengan bangsa asing. Bahkan Aceh telah mampu menyatukan berbagai kekuatan masa lalu dengan membentuk kerajaan adi daya

- dan telah menunjukkan pentingnya membangun persatuan demi pencapaian tujuan yang lebih besar;
2. Resistensi Aceh dalam melawan kekuatan kolonialisme Portugis dan Belanda, menjadi bukti konsistensi dalam melawan penundukan;
 3. Peran para Ulama dan Cendekiawan Aceh dalam berbagai disiplin ilmu menjadi penguat untuk memunculkan kembali entitas Aceh di level yang lebih luas pada kondisi sekarang;
 4. Pengkajian entitas Aceh dalam konteks historis akan dapat menjadi inspirasi dan motivasi dalam menyusun perencanaan pembangunan dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya untuk kemajuan Aceh di masa yang akan datang dan tetap dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajis, A. A. (2017). RAMNI-ILAMURIDESAM: KERAJAAN ACEH PRA-SAMUDERA PASAI RAMNI-ILAMURIDESAM: PRE-SAMUDERA PASAI KINGDOM OF ACEH.
- Andaya, L. Y. (2001). The seventeenth-century Acehnese model of Malay society. *Reading Asia: New Research in Asian Studies*, 83-109.
- Baiti, R., & Razzaq, A. (2014). Teori dan proses islamisasi di Indonesia. *Wardah: Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan*, 15(2), 133-145.
- Bathuthah, I. (2012). Rihlah Ibnu Bathuthah. *Terj. Muhammad Muchson Anasy dan Khalifurrahman Fath. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.*
- Benedetto, L. F. (2014). *The Travels of Marco Polo*. Routledge.
- Abdul Aziz Dahlan A. A. (1991). *Tasawuf Sunni dan Tasawuf Falsafi: Tinjauan Filosofis dalam Ulumul Qur'an*. Volume 2, No. 8.
- Djajadiningrat, R. H. (1984). *Kesultanan Aceh (suatu pembahasan tentang sejarah kesultanan Aceh berdasarkan bahan-bahan yang terdapat dalam: karya Melayu)*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Farida, U. (2017). Kontribusi Nur ad-Din Ar-Raniri dan Abd Ar-Rauf As-Sinkili dalam Pengembangan Kajian Hadits di Indonesia. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 3 (1), 1-10.
- Faridy, H. MS, dkk. (2008). *Ensiklopedi Tasawuf*. Penerbit Angkasa.
- Fitriani, A., Siregar, I., & Ramli, S. (2022). PERAN SULTAN MALIKUSSALEH DALAM PERKEMBANGAN KERAJAAN SAMUDERA PASAI 1297-1326M. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 2(1), 11-22.

Gottschalk, L. (1986), *Mengerti Sejarah*, UI Press.

Hamka. (2002). *Sejarah Umat Islam*, Edisi Baru. Kerjaya Printing Industries Pte.

Haykal, M. (2022). The Ottoman Turkish Expedition and the Anti-Colonialism Movement of the Sultanate of Aceh Darussalam 1530-1568. *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 3(2).

<https://kumparan.com/acehkini/jejak-kota-cambay-india-di-tanah-aceh-sampai-ke-gresik-4-1rsbp3tTyLt/1>

Ilham, M., & Merry, Y. (2021). Kebijakan Hukum Pada Pemerintahan Sultanah di Kesultanan Aceh Darussalam (1641-1699). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 10(1), 1-13.

Kamaruzzaman, K. (2016). Relasi Islam Dan Politik Dalam Sejarah Politik Aceh Abad 16-17. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 16(2), 267-292.

Kuntowijoyo, K. (2003). Metodologi Sejarah, edisi kedua. *Yogyakarta: Tiara Wacana*.

Kurahman, T., & Qudsy, S. Z. (2021). Moderasi Pemikiran Abdurrauf Al-Singkili di Tengah Gejolak Pemikiran Tasawuf Nusantara Abad Ke-17. *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, 7, 1-18.

Kurniati, D. (2021). Ulama-Ulama Sufi Penyebar Islam dari Aceh Abad 17 (Biografi, Karya, dan Ajaran). *Tsaqofah & Tarikh: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 17(111), 17-30.

Lombard, Denys. (1986), *Kerajaan Aceh; Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. Penerbit Balai Pustaka.

Mailin, M. (2021). Peran Sultan Iskandar Muda dalam Pengembangan Islam dan Kesultanan Melayu di Sumatera Timur. *Jurnal Komunika Islamika: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Kajian Islam*, 8(1), 25-31.

Maulia, S. T., & Ichsan, M. (2022). JEJAK PERKEMBANGAN ISLAM PADA KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 2(2), 77-84.

Muchsin, M. A. (2019). Kesultanan Peureulak dan Diskursus Titik Nol Peradaban Islam Nusantara. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 2(2), 218-238.

Nasution, F. (2020). Kedatangan dan Perkembangan Islam ke Indonesia. *MAWA IZH JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN*, 11(1), 26-46.

- Nazaruddin, M. (2014). Dimensi Pembentuk Keadaran Identitas Keacehan dan Citra Diri Aceh. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. Vol. 27(1), 44-54. <http://dx.doi.org/10.20473/mkp.V27I12014.44-54>
- Ni'am, Syamsun. "Hamzah Fansuri: Pelopor Tasawuf Wujudiyah Dan Pengaruhnya Hingga Kini Di Nusantara." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 12.1 (2017): 261-286.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Penerbit Serambi.
- Riddell, P. (2001), *Islam and the Malay-Indonesia World: Transmission and Responses*. Hurst & Company.
- Riddell, P. G. (2002). Rotterdam MS 96 D 16: the oldest known surviving Qur'an from the Malay World. *Indonesia and the Malay world*, 30(86), 9-20.
- Said, M. (1981). *Aceh sepanjang abad* (Vol. 1). Percetakan dan Penerbitan Waspada.
- Siahaan, S., Hendra, A., & Midhio, I. W. (2021). Strategi Perang Semesta dalam Perang Aceh (1873-1912). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2537-2548.
- Suud, F. M. (2015). Perempuan Islam Dalam Sejarah Kerajaan Aceh Darussalam (1641-1699 M). *Serambi Tarbawi*, 3(1).
- Taylor, J. G. (2018). Royal tour by proxy: The embassy of Sultan Alauddin of Aceh to the Netherlands, 1601–1603. In *Royals on tour* (pp. 23-37). Manchester University Press.
- Teh Gallop, A. (2004). Ottoman influences in the seal of sultan alauddin riayat syah of aceh (r. 1589–1604). *Indonesia and the Malay World*, 32(93), 176-190.
- Tjandrasasmita, U. (2000). Kota-Kota Muslim di Indonesia Dari Abad XIII sampai XVIII Masehi. *Kudus: Menara Kudus*, 42.
- Wijaya, D. (2020). Narasi dari Sang Rival: Serangan Aceh ke Melaka Menurut Sumber-Sumber Portugis. *Jurnal Sejarah*, 3(1).
- Zuboidi, H. (2018). Kepentingan Utsmani Menjalin Hubungan Dengan Kerajaan Aceh Darussalam. *Jurnal Peurawi*, 1(2), 124.